

## ABSTRAK

Munculnya Pinjaman *Online* ilegal kian meresahkan banyak masyarakat. Maka dari itu Tujuan dari penulisan Karya Ilmiah ini yaitu untuk melihat legalitas dan hukuman yang diberikan kepada Pinjaman *Online* ilegal bila melihatnya melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor POJK No.77 Tahun 2016 Tentang Layanan Pinjam meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini yaitu yuridis normatif. Dalam pelaksanaannya ada sebuah bentuk ancaman dan penipuan sebagaimana secara *Lex Specialis* diatur dalam Undang-Undang nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Teknologi Elektronik walaupun diatur pula dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana. Oleh karenanya peran Otoritas jasa Keuangan sangat diperlukan terkait dengan memuncaknya pinjaman *online* ilegal ini dalam hal pencegahan agar masyarakat tidak mudah tergiur oleh para pelaku pinjaman *online* ilegal. Walaupun dalam pemberian hukuman terkait pemidanaan pinjaman *online* tidak hanya satu akan tetapi yang memberatkan dan dirasa memiliki efek jera untuk para pelaku dan korporasinya terlihat pada Undang-Undang nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan.

Kata Kunci : Pinjaman *Online* ilegal, Pertanggung Jawaban Pidana, OJK.

## ABSTRACT

*The emergence of illegal online loans is increasingly troubling many people. Therefore, the purpose of writing this Scientific Work is to see the legality and penalties given to illegal online loans when viewed through the Financial Services Authority Regulation number POJK No. 77 of 2016 concerning Information Technology-Based Borrowing and Borrowing Services and Law Number 7 of 2014 on Trade. The research method used in this paper is normative juridical. In its implementation there is a form of threat and fraud as Lex Specialis is regulated in Law number 19 of 2016 amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Technology although it is also regulated in the Criminal Code. Therefore, the role of the Financial Services Authority is very much needed related to the peak of this illegal online loan in terms of prevention so that people are not easily tempted by illegal online loan actors. Although there is not only one punishment related to online lending, but one that is burdensome and is felt to have a deterrent effect for the perpetrators and their corporations can be seen in Law number 7 of 2014 concerning Trade.*

*Keywords: Illegal Online Loans, Criminal Liability, OJK.*